

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2012
2012**

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.1, LD.2012/NO.1 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 7 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2012**

ABSTRAK

- :
- Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas serta Prioritas dan Plafon Anggaran.yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sambas.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
 - Penjelasan ... hlm

PENANAMAN MODAL

2012

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.2, LD.2012/NO.2 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PENANAMAN MODAL

ABSTRAK

- : – Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Sambas mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bentuk Badan Usaha Dan Kedudukan, Bidang Usaha Dan Pengembangan Usaha, Perlakuan Terhadap Penanam Modal, Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab Dan Larangan, Perizinan Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Insentif Daerah Dan Kemudahan Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Jangka Waktu Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan, Pengembangan Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administrasi.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2012
- Penjelasan 11 hlm

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2012

2012

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.4, LD.2012/NO.4 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK

- :
- Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan .

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2012.
 - Penjelasan ... hlm

PEMBENTUKAN DESA DI KABUPATEN SAMBAS

2012

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.5, LD.2012/NO.5 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PEMBENTUKAN DESA DI KABUPATEN SAMBAS

ABSTRAK

- :
- Bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kabupaten Sambas.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dengan terbentuknya Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa-Desa Induk, dikurangi dengan wilayah Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Kekayaan desa induk yang berada pada wilayah desa-desa hasil pembentukan menjadi kekayaan desa hasil pembentukan. Penyerahan kekayaan desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa. Penyerahan kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD. Bupati melakukan pembinaan kepada Desa-Desa hasil pembentukan melalui Camat.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2012
 - Penjelasan 1 hlm

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2012

PERDA KABUPATEN SAMBAS NO.7, LD.2012/NO.6 SETDA KABUPATEN SAMBAS : 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK

- : – Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek Pajak, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak Dan Cara Menghitung Pajak, Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terhutang, Pendataan, Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan, Keberatan Dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Kedaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2012
- Penjelasan 10 hlm